



RENCANA KERJA  
PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN  
2017

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 8/PHLHK/SET/SET.1/2/2017

TENTANG

RENCANA KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Strategi Seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/PHLHK-SETDIT/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Kerja Tahunan Seluruh unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menlhk-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.40/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 211);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.72/MenLHK-Setjen/Rokum.1/8/2016 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1313);



- 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.78/MenLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958);
- 15 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P- 4/PHLHK-SETDIT/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- 16 Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.3/PHLHK-SETDIT/2016 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal Januari 2017



DIREKTUR JENDERAL

Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, M.P.M  
NIP. 196607111992031018

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR :  
TANGGAL : Januari 2017

TENTANG  
RENCANA KERJA  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

## PENGANTAR

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen GAKKUM) merupakan unit eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru terbentuk pada tahun 2015. Ditjen GAKKUM dibentuk untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Menapaki tahun ketiga, Ditjen PHLHK terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), sebagai upaya untuk mengatasi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Ditjen GAKKUM mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menangani pengaduan, melakukan pengawasan untuk memastikan ketaatan izin penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha, melakukan pencegahan dan pengamanan kawasan Hutan dan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Instrumen Pencegahan yang dilakukan untuk menurunkan terjadinya kejahatan antara lain adalah penyadartahuan masyarakat dan pengawasan perizinan. Ada tiga instrumen penegakan hukum yang diterapkan oleh Ditjen GAKKUM, yaitu: hukum pidana, hukum perdata, dan sanksi administratif. Instrumen penegakan hukum tersebut tidak hanya berguna dalam menimbulkan efek jera, namun juga untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.

Untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berbagai inovasi sedang dikembangkan, antara lain melalui: instrumen pendekatan hukum pidana terpadu (*multidoor*), peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, serta perluasan jejaring masyarakat. Inovasi-inovasi ini dilakukan sebagai komitmen politik untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih berkualitas.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2017 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen GAKKUM, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.

Jakarta, Januari 2017  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Rasio Ridho Sani

**DAFTAR ISI**

|                |  |        |
|----------------|--|--------|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>   |        |
|                | 1. Kondisi Umum;   | Hal. 1 |
|                | 2. Kondisi Khusus;   | Hal. 2 |
|                | 3. Rencana Kerja Pemerintah;   | Hal. 3 |
|                | 4. Prioritas Nasional Tahun 2017;                                      | Hal. 4 |
|                | 5. Rencana Aksi Nasional Kegiatan Prioritas Presiden;                  | Hal. 9 |
|                | 6. Rencana Aksi Nasional, Hak Asasi Manusia;                           | Hal.14 |
|                | 7. Rencana Aksi Open Government Indonesia;                             | Hal.15 |
|                | 8. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG);                          | Hal.17 |
|                | 9. Kelompok Kerja Program dan Anggaran;                                | Hal.18 |
|                | 10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;                             | Hal,18 |
|                | 11. Satuan Tugas Standar Pengendalian Internal Pemerintah              | Hal.18 |
| <b>BAB II</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   |        |
|                | 1. Indikator Kinerja Program   | Hal.19 |
|                | 2. Indikator Kinerja Kegiatan  | Hal.20 |
|                | 3. N.S.P.K   | Hal.25 |
| <b>BAB III</b> | <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>   |        |
|                | 1. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Hal.27 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>KERANGKA PENDANAAN</b>  | Hal.29 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>   | Hal.32 |

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| Gambar. 1  | Indikator Kinerja Utama, Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;  | Hal. 2  |
| Gambar. 2  | Prioritas Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;   | Hal. 4  |
| Gambar. 3  | Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum;   | Hal. 5  |
| Gambar. 4  | Kegiatan Prioritas Nasional, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;   | Hal. 6  |
| Gambar. 5  | Kegiatan Prioritas Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum;   | Hal. 8  |
| Gambar. 6  | Kegiatan Prioritas Nasional, Sistem Peradilan Perdata yang Mudah   | Hal. 9  |
| Gambar. 7  | Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017   | Hal. 19 |
| Gambar. 8  | Indikator Kinerja Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi   | Hal. 20 |
| Gambar. 9  | Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  | Hal. 21 |
| Gambar. 10 | Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan   | Hal. 22 |
| Gambar. 11 | Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan   | Hal. 23 |
| Gambar. 12 | Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya   | Hal. 24 |
| Gambar. 13 | Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Hal.27  |
| Gambar. 14 | Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK  | Hal.28  |
| Gambar. 15 | Matrik Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan   | Hal.29  |



|        |    |   |        |
|--------|----|---|--------|
| Tabel. | 1  | Matriks Kegiatan Prioritas (Aksi) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;  | Hal.10 |
| Tabel. | 2  | Matriks Kegiatan Prioritas (Aksi) Penanganan Pengawasan ijin lingkungan hidup pada unit/kegiatan usaha                      | Hal.11 |
| Tabel. | 3  | Matriks Kegiatan (Aksi) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;   | Hal.12 |
| Tabel. | 4  | Matrik Kegiatan Prioritas Aksi, Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan                             | Hal.13 |
| Tabel. | 5  | Matrik Rencana Aksi Open Government Indonesia   | Hal.16 |
| Tabel. | 6  | Matrik Pendanaan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan   | Hal.30 |
| Tabel. | 7  | Matrik Alokasi Anggaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | Hal.30 |
| Tabel. | 8  | Matrik Pembagian Pagu Anggaran Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                       | Hal.31 |
| Tabel. | 9  | Matrik Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan   | Hal.32 |
| Tabel. | 10 | Matrik Arsitektur Data Informasi dan Kinerja, Anggaran dan Target<br>Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Hal.35 |
| Tabel. | 11 | Matrik Distribusi Target Indikator Kinerja Kegiatan lingkup<br>Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan       | Hal.37 |
| Tabel. | 12 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi                                  | Hal.38 |
| Tabel. | 13 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  | Hal.39 |
| Tabel. | 14 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | Hal.40 |
| Tabel  | 15 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan   | Hal.41 |
| Tabel  | 16 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya                                    | Hal.42 |
| Tabel  | 17 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Sumatera   | Hal.43 |
| Tabel  | 18 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara                          | Hal.45 |
| Tabel  | 19 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Kalimantan   | Hal.47 |
| Tabel  | 20 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Sulawesi   | Hal.49 |
| Tabel  | 21 | Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK Wilayah Maluku Papua                                       | Hal.50 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Kondisi Umum

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan tahunan ketiga yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP Tahun 2017. Penyusunan Renja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

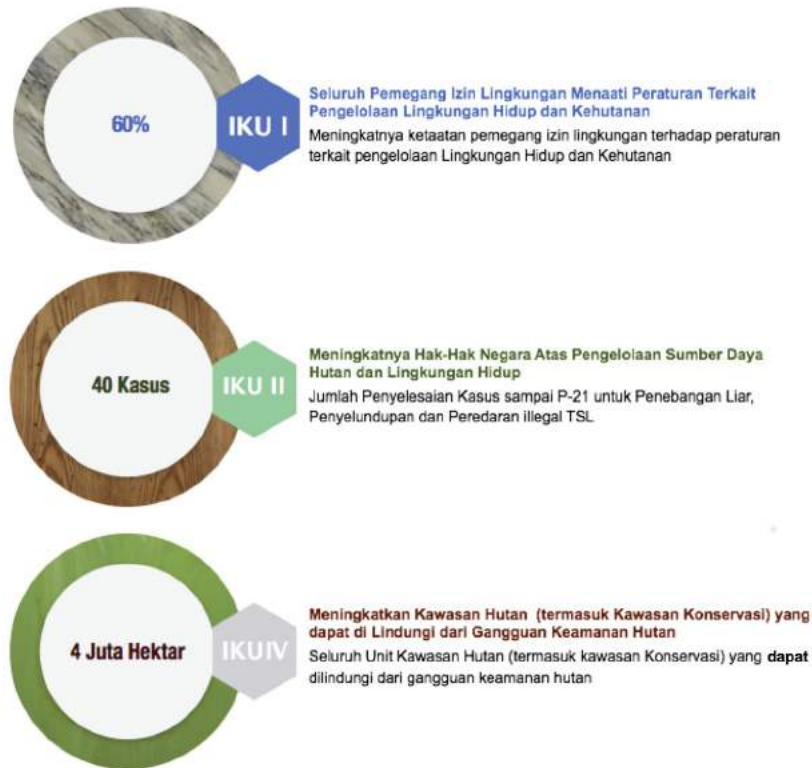
Kehutanan. Matrik Rencana Tindak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif 2017.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjelasan Umum Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diharapkan dapat memberikan

gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2017, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.







Gambar 1. Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017(P7)

## II. Kondisi Khusus

Program Penegakan Hukum LHK (P7) di tahun 2017 mempunyai 3 (Tiga) Sasaran Program (Outcome) yang mendukung pencapaian Sasaran Kementerian LHK yang pertama, yaitu

Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan cara Meningkatkan ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencapai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 64-65 (IKU 1). Kedua, Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (IKU 2), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelesaikan

kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Penebangan Liar, Penyelundupan dan Peredaran Illegal TSL hingga P-21 sehingga Kinerja Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,9 Triliun tercapai. Ketiga, Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (IKU 4) dengan melindungi seluruh unit kawasan (termasuk kawasan konservasi) dari gangguan keamanan hutan untuk mencapai target Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70% sebanyak 260 Unit.



### III. Rencana Kerja Pemerintah

Sesuai dengan Arah Presiden Republik Indonesia, Bpk Joko Widodo, pelaksanaan *Money Follow Program* di dalam Strategi Nasional Rencana Kegiatan Pemerintah Tahun 2017 turut mempengaruhi Secara Signifikan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2017. Dan Jika mengikuti Rencana Strategis 2015-2019 langkah ini seperti menggeser milestones pembangunan Tahun 2018 ke Tahun 2017. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Langkah ini justru menjadi semacam penajaman kembali atas peran Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan di dalam benak kami, penajaman ini terlihat lebih nyata untuk mengantarkan tujuan pembangunan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Publik. Selanjutnya di dalam proses perumusan dari penajaman kinerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah di lakukan di berbagai forum dan mekanisme, mulai dari Multilateral Meeting I dan II, Bilateral Meeting I dan II, serta Trilateral Meeting I dan II, maka dipertajam untuk Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2017 Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu pada RKP Tahun 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. RKP 2017 merupakan

penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.



#### IV. Prioritas Nasional Tahun 2017

Didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada pada 1 (satu) Prioritas Nasional, 1 (satu) Program Prioritas, 4 (Empat) Kegiatan Prioritas dimana terdapat 17 (Tujuh Belas) Target yang diukur didalam Indikator Kinerja Kegiatan Masing Masing Unit Kegiatan di dalam Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Maka perlu di jabarkan satu persatu keseluruhan Target yang dimaksud beserta Indikator Kinerja Kegiatan- Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, seperti berikut ini;



Gambar : Prioritas Nasional Kepastian Penegakan Hukum, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017



## 1. Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum.

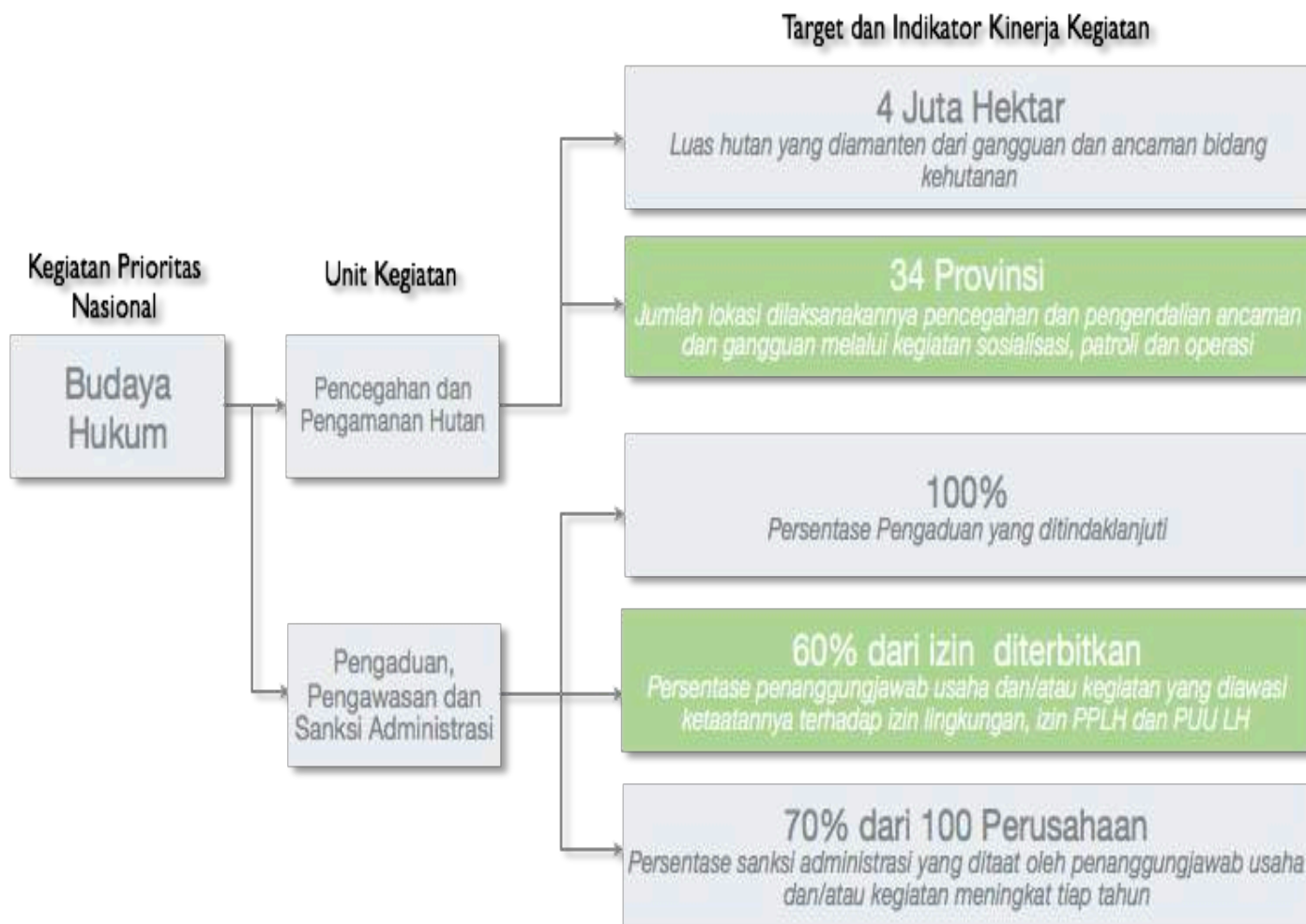
Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum terdapat 2 (dua) Unit Kegiatan yaitu Unit Kegiatan Pencegahan Pengamanan Hutan dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Unit Kegiatan Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Target di Unit Kegiatan Pencegahan dan pengamanan Hutan di Tahun 2017 ada 2(dua) yaitu 4.000.000 Hektar Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan, dan Jumlah lokasi sebanyak 34 Provinsi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi.

Target di Unit Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di tahun 2017 ada 3 (Tiga) yaitu 100 Persen pengaduan yang ditindaklanjuti, 60 persen dari izin diterbitkan kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, dan 70% Sanksi Administrasi yang ditaat oleh

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun dari 100 Perusahaan.



Gambar. Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum



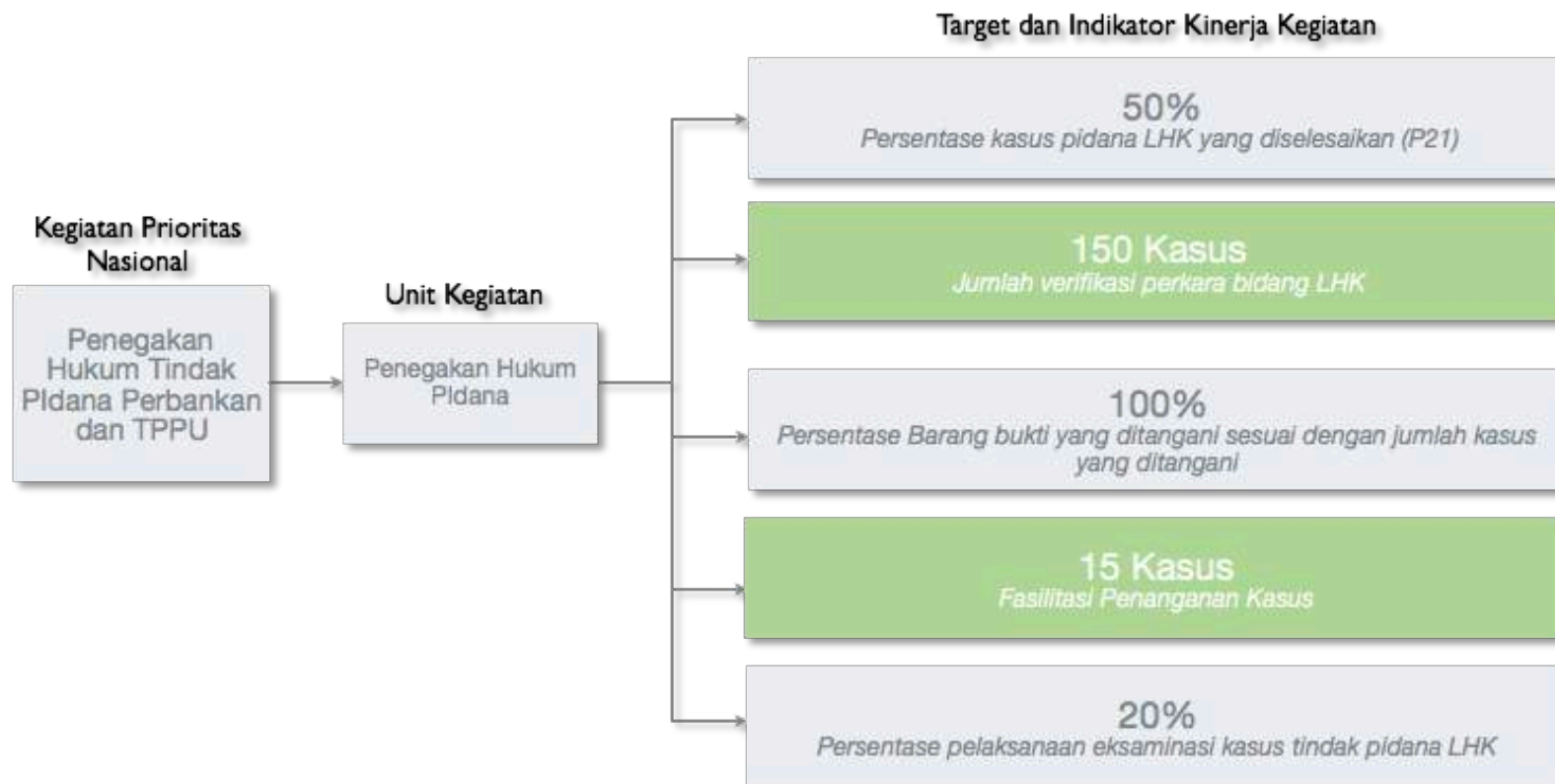
## 2. Kegiatan Prioritas Nasional, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian uang

Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum terdapat 1 (Satu) Unit Kegiatan yaitu Unit Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Target di Unit Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2017 ada 5 (Lima) yaitu 50% kasus pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P-21), 150 kasus yang diverifikasi perkara bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, 100 Persen penanganan barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani, Fasilitas penanganan kasus sebanyak 15 Kasus dan 20 Persen pelaksanaan eksaminasi kasus tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar. Kegiatan Prioritas Nasional, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang



### 3. Kegiatan Prioritas Nasional, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum

Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum terdapat 3 (tiga) Unit Kegiatan, yaitu Unit Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi serta Unit Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

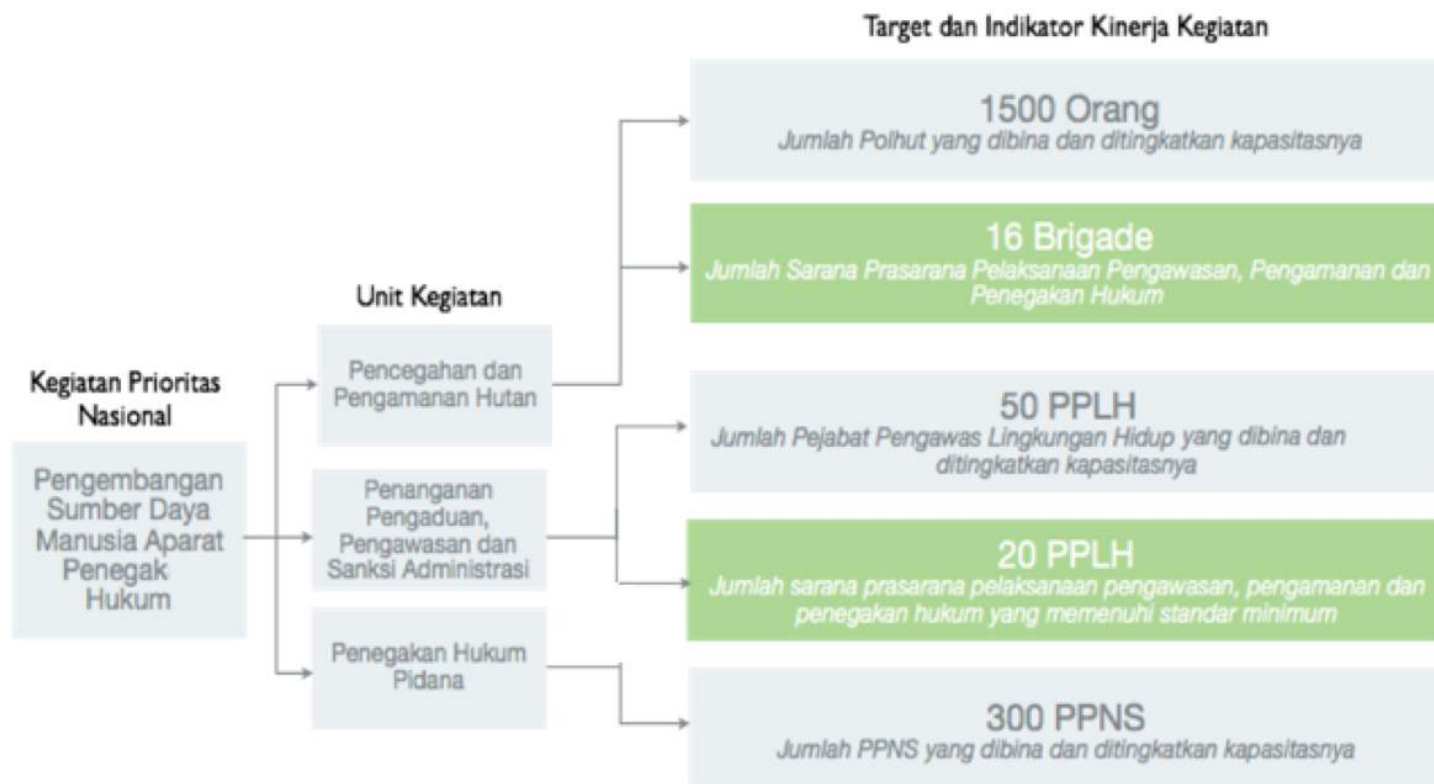
Target di Unit Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan ada 2 (Dua) yaitu Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 1500 Orang, dan Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum

sebanyak 16 Brigade Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC).

Target di Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ada 2 (dua) yaitu Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya, dan Jumlah Sarana dan

Prasarana Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum.

Target di Unit Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 300 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



Gambar. Kegiatan Prioritas Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum



#### 4. Kegiatan Prioritas Nasional, Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat

Didalam Kegiatan Prioritas Nasional, Budaya Hukum terdapat 1 (Satu) Unit Kegiatan yaitu Unit Kegiatan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Target di Unit Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai 2 (dua) target dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 75 persen kasus sengketa yang

diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan, dan Jumlah Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 Gugatan pertahun.



*Kegiatan Prioritas Nasional, Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat*

## V. Rencana Aksi Nasional Kegiatan Prioritas, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



### KANTOR STAF PRESIDEN

Didalam Rencana Aksi Nasional Kegiatan Prioritas Kantor Staff Presiden, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun matrik untuk pencapaian target target yang ditentukan oleh Kantor Staff Presiden. Berikut kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan dalam matrik, dengan rincian sebagai berikut:

#### A. RAN KSP

1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan
2. Pengawasan izin Lingkungan Hidup
3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
4. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

#### B. RAN HAM

1. Pengaduan Masyarakat telah ditindaklanjuti

#### C. RA OPEN GOVERNMENT INDONESIA

1. Penyusunan Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Telah tersedianya sistem penanganan pengaduan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.





## 1. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Table 1 . Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

| No  | Kegiatan Prioritas (AKSI)  | Instansi Terkait   | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12 |  |
|-----|--|--|---|---|-------------------------------------|--|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)   | (6)                                 |  |
| RA  | Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan | Ditjen PHPL, Ditjen PSKL, BP2HLHK, UPT, Ditjen KSDAE, Pemda, TNI, Kepolisian | Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan di 34 Propinsi | Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di n lokasi | B04                                 | Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di $(1/10 \times n)$ lokasi                        |
|     |  |  |   |   | B06                                 | Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di $(1/2 \times n)$ lokasi (komulatif B.04 + B.06) |
|     |  |  |   |   | B09                                 | Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di $(8/10 \times n)$ lokasi                        |
|     |  |  |   |   | B12                                 | Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di n lokasi  |



## 2. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Table 2 . Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

| No  | Kegiatan Prioritas (AKSI)  | Instansi Terkait  | Kriteria Keberhasilan                                     | Ukuran Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12 |  |
|-----|--|---|---|---|-------------------------------------|--|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                                 |  |
| RA  | Penanganan dan Pengawasan Ijin Lingkungan Hidup pada Unit/Kegiatan Usaha | Kementerian KumHam, ESDM, Perhubungan, ATR,PURP,KP, Provinsi/Kab/Kota | Meningkatnya efektivitas pengawasan Ijin Lingkungan Hidup | Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya sebesar 100% atau n ijin | B04                                 | Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Maret adalah 10%                          |
|     |  |   |   |   | B06                                 | Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Mei adalah 30%<br>(komulatif B.04 + B.06) |
|     |  |   |   |   | B09                                 | Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Agustus adalah 70%                        |
|     |  |   |   |   | B12                                 | Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Desember adalah 100%                      |



### 3. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Table 3 . Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

| No | Kegiatan Prioritas (AKSI)              | Instansi Terkait   | Kriteria Keberhasilan   | Ukuran Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12 |   |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1  | 2                                      | 3  | 4   | 5  | 6                                   |   |
| RA | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Polda, BLH Prov/Kab/Kota, Akademisi, Praktisi Hukum, Ahli, LSM | Meningkatnya efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup | Persentase PSLH melalui pengadilan sebesar 75% pertahun dari sengketa LH yang telah diverifikasi didaftarkan dan diselesaikan melalui pengadilan | B04                                 | Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 1 gugatan                         |
|    |  |  |   |  | B06                                 | Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 5 gugatan (komulatif B.04 + B.06) |
|    |  |  |   |  | B09                                 | Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 8 gugatan                         |
|    |  |  |   |  | B12                                 | Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 10 gugatan                        |



#### 4. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Table 4. Matrik Kegiatan Prioritas (Aksi) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Staff Presiden tahun 2016

| No  | Kegiatan Prioritas (AKSI)                                       | Instansi Terkait   | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12 |  |
|-----|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                                 |  |
| RA  | Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah | Tertanganinya perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 | B04                                 | Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 15% dari perkara yang disidik                         |
|     |   |  |  |  | B06                                 | Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 30% dari perkara yang disidik (komulatif B.04 + B.06) |
|     |   |  |  |  | B09                                 | Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 55% dari perkara yang disidik                         |
|     |   |  |  |  | B12                                 | Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 75% dari perkara yang disidik                         |



## VI. Rencana Aksi Nasional, Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berpartisipasi didalam komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturalisme yang

harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara kekuasaan negara secara akuntabel.

RANHAM\* adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia, yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan,

perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Adapun sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia

\* Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019



## VII. Rencana Aksi *Open Government Indonesia*

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017 menjadi pertama yang ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Renaksi OGI 2016-2017 ini merupakan upaya mengakselerasi komitmen pemerintah dalam peningkatan partisipasi publik di dalam penyelenggaraan pemerintah, perbaikan tata kelola pemerintah melalui penyempurnaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan Keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan tata kelola data.

Renaksi OGI 2016-2017 ini merupakan komitmen dari 14 Kementerian/Lembaga, 5 (lima) Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil.

Pemerintah membuka ruang dan akses bagi publik untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan mampu menjawab lima tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintah yang lebih terbuka dan akuntabel yakni praktek korupsi yang sistematis; akses informasi publik yang terbatas; Saluran partisipasi publik yang terbatas; penyediaan pelayanan publik yang belum optimal, sistem penegakan hukum yang lemah.

Perubahan mindset dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Indonesia. "Fokus dalam meningkatkan keterbukaan informasi system anggaran di Kementerian Keuangan; Peningkatan kapasitas pengawasan pelayanan publik di Ombudsman; Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah di Kantor Staf Presiden; serta adanya penguatan data terintegrasi di Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017 adalah Renaksi ke-empat sejak Indonesia bergabung di dalam kemitraan global pemerintahan terbuka atau lebih dikenal dengan Open Government Partnership (OGP)

## Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017





Table 5. Rencana Aksi Open Government Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| No   | Aksi   | Instansi Terkait                    | Kriteria Keberhasilan  | Ukuran Keberhasilan   | Target T17-B12   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
| <b>Grand Strategy Pemerintah Terbuka</b>   |  |                                     |  |   |  |
| <b>Peningkatan Partisipasi Publik</b>  |  |                                     |  |   |  |
| <b>Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik</b> |  |                                     |  |   |  |
| 1  | 2  | 3                                   | 4  | 5   | 6  |
| RA   | Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan | Kemen PAN RB, Kantor Staff Presiden | Terintegrasinya sistem penanganan pengaduan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sistem LAPOR-SP4N | 1) Diterbitkannya Peraturan MenLHK tentang tata cara Penanganan Pengaduan LHK | T17-B03:<br>1) Diterbitkannya peraturan Menteri LHK tentang cara penanganan pengaduan LHK<br>2) Dimunculkannya fitur layanan pengaduan online masyarakat KLHK yang terpadu dilaman muka website KLHK<br>3) Terhubungnya sistem pengaduan KLHK dengan sistem LAPOR-SP4N |
|  |  |                                     |  | 2) Beroperasi sistem penanganan pengaduan online KLHK                         | T17-B06: Ditanganinya 50% pengaduan diterima KLHK  |
|  |  |                                     |  | 3) Terintegrasinya sistem pengaduan di KLHK dengan Sistem LAPOR               | T17-B09: Ditanganinya 75% pengaduan yang diterima KLHK   |
|  |  |                                     |  |   | T17-B12: Ditanganinya 100% pengaduan yang diterima KLHK  |
|  |  |                                     |  |   | Definisi "ditangani": s/d pelimpahan ke unit kerja terkait, Follow up : Fasilitasi diskusi keterhubungan dengan Tim Lapor  |



### VIII. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG);

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

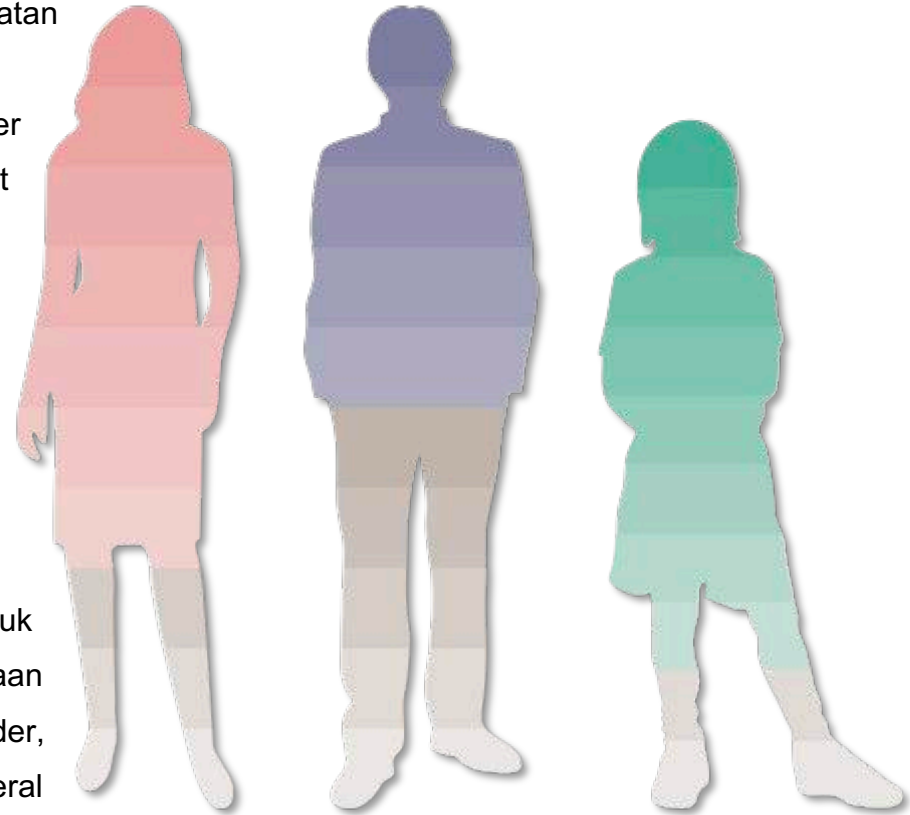
Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan Sosialisasi, Advokasi dan Implementasi Pengarusutamaan Gender, sehingga untuk memenuhi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bawah naungan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.







### VIII. Kelompok Kerja Program dan Anggaran

Kelompok Kerja *Program dan Anggaran* lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. melakukan pengarah dan pembinaan Program dan Anggaran seluruh pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### IX. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Kelompok Kerja *Pengarusutamaan Gender* lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. melakukan pengarah dan pembinaan Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

### X. Satuan Tugas Standar Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/MenLHK-Setjen/2015 ditetapkan bahwa setiap satuan kerja pusat maupun satuan kerja Unit Pelaksana teknis wajib membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, Tim Pengelolaan data, informasi dan pelaporan, dan sistem pengendalian anggaran di tahun 2017.

Tujuan SPIP untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan



## BAB II INDIKATOR KINERJA

### I. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

Satu diantara 13 Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah “Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”, yang pengelolaannya dikuasakan kepada Ditjen PHLHK. Sasaran Program dari “Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan” ini secara substantif di tahun 2017 mengalami perubahan Indikator Kinerja Program disesuaikan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2017, Indikator Kinerja Program yang ditetapkan di tahun 2017 terdiri

atas 3 (tiga) sasaran program KLHK (IKU I, IKU II dan IKU IV), yang masing-masingnya memiliki satu Indikator Kinerja Program (IKP), sebagaimana ditunjukkan dan ditetapkan dalam

dokumen RKP TA 2017 dan Penyesuaian Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup, No : P.78/MenLHK/Setjen/Set.1/9/2016.



Gambar, Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2017



## II. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN;

### a. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (K1);

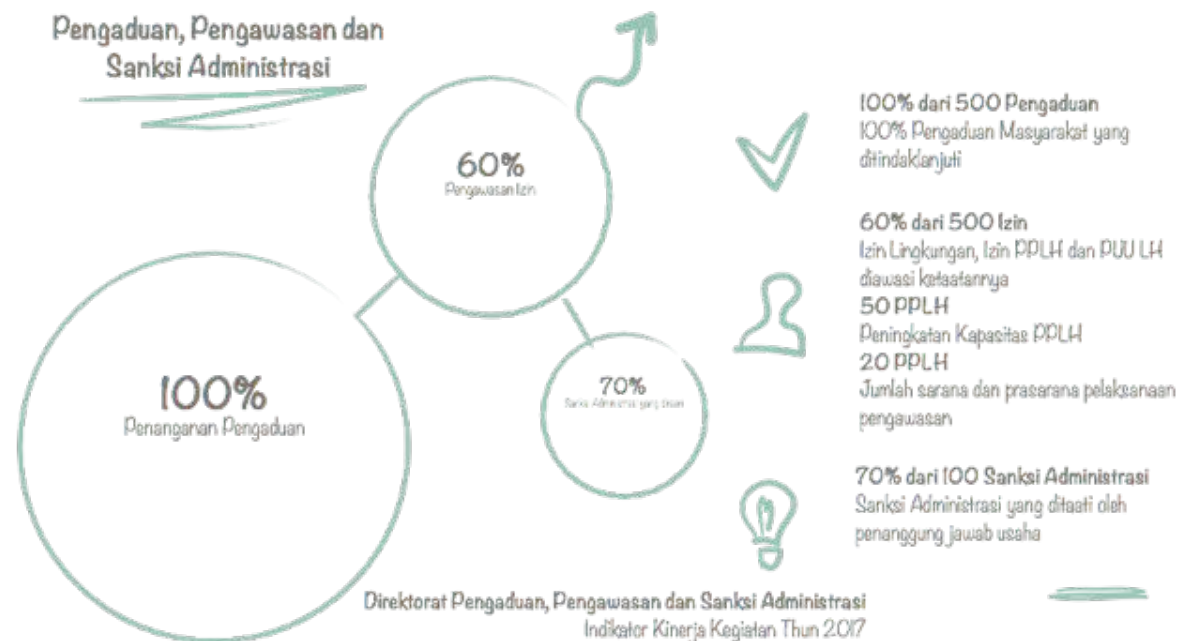
Subdit Penanganan Pengaduan akan merumuskan kebijakan (NSPK), melaksanakan pengelolaan pengaduan LHK, melaksanakan evaluasi penyerahan penanganan pengaduan di bidang LHK di 3 Wilayah yaitu Jabanusra, Kalimantan dan Maluku serta melaksanakan supervisi dan verifikasi pengaduan di daerah Jakarta, DIY, Bali dan Batam.

Subdit Pengawasan (UK2) turut menyusun perumusan kebijakan (NSPK), Melaksanakan pengawasan 761 Izin (IPJ, SDA dan Karhutla), membangun basis data dan system e-monitoring. Melaksanakan Diklat PPLH bekerjasama dengan Pusdiklat BP2SDM, *Refreshment* kepada PPLH di Dit PPSA dan BPPH LHK.

Melengkapi Perlengkapan Pengawasan (*Jacket, Ear Plug, Kacamata, Topi/Helmet*), Membeli *Fixed Wing*, Kamera Thermal (*Infrared*), Membuat Film Dokumenter Pengawasan.

Subdit Pengenaan Sanksi Administrasi didalam penerapan sanksi akan membuat Surat

Keputusan Sanksi Administrasi, Melaksanakan pemantauan ketaatan Sanksi Administrasi terhadap 100 Perusahaan dan membuat perumusan kebijakan (NSPK) Draft Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jangka Waktu Penerapan Sanksi Administrasi.



Gambar. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan sanksi Administrasi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



## b. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2);

Ditahun 2017, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, dan Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Alam mengusulkan perubahan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan menjadi “Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebesar 75% per Tahun dari Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diterima”.

Dan Usulan Perubahan Untuk Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, yaitu “Jumlah Kasus yang Ditangani Minimal Menghasilkan Sebanyak 10 Dokumen Perkara Perdata Pertahun”. Data Dukung Dokumen seperti Dokumen Pendaftaran, Dokumen gugatan, Dokumen Beracara dan Dokumen Upaya Hukum.

Didalam Proses Penyusunan Dokumen

### PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



#### 10 Gugatan

Jumlah Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Minimal 10 Gugatan Per Tahun



#### 75 % dari Jumlah Sengketa yang diterima

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebanyak 75% dari Jumlah Sengketa yang di Verifikasi dan Mencapai Kesepakatan

*Gambar Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Perkara Perdata untuk 1 (satu) Pendaftaran Gugatan di Tahapan Pengadilan Negeri (PN) itu sudah menyusun 4 (empat) dokumen yaitu Daftar Gugatan, Menyusun Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan, sementara untuk tahapan dokumen di Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali

hanya 1 (satu) Dokumen asing masing yaitu Dokumen Daftar Gugatan, sehingga di dalam pencapaian 1 (satu) Gugatan Perkara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup membutuhkan 7 (Tujuh) Dokumen.



**c. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K3);**

Penanganan Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Tipologi Kasus seperti Pembalakan Liar, Perambahan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi, Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Kerusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Ditahun 2017 akan di susun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana serta Rancangan Pedoman Teknis Penanganan Kasus

Karhutla, Revisi Permen LHK tentang Tata Laksana Jabatan PPNS LH, Revisi Permenhut tentang Penetapan Harga Limit

Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu. Pedoman Tata Hubungan Kerja Penegakan Hukum Pidana, Pedoman Teknis Penanganan Kasus Perambahan Hutan, serta Nota Kesepahaman dengan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi.

Untuk Analisa kebutuhan Jumlah Pejabat PPNS LHK dari total 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, diperlukan tambahan personil PPNS baru sebanyak 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) Orang di Tahun 2017.



Gambar. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan



#### d. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K4);

Didalam Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan akan dilaksanakan beberapa Kegiatan seperti, Pembinaan Polisi Hutan akan dilakukan Latihan menembak, Penilaian Polhut dalam Lomba Wanalestari, Diklat dasar bagi Polhut pembina, Diklat peningkatan kemampuan bidang inteligen

Untuk mengamankan luas hutan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan akan dilakukan Koordinasi dan kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Tindak lanjut kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan, Pertemuan tahunan kolaborasi dengan Dit. KKH memfasilitasi pertemuan AWG-CITES-WE, Pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan lainnya, Operasi pemulihan keamanan kawasan hutan, Mobilisasi tenaga pencegahan dan

pengamanan hutan, Publikasi dan sosialisasi pencegahan dan pengamanan hutan, Penyusunan NSPK bidang pencegahan dan pengamanan hutan, Konsultasi publik NSPK bidang pencegahan dan pengamanan hutan,

Untuk mencapai target jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan dan pengendalian ancaman dan bidang kehutanan akan dilakukan Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan tipihut, Pengelolaan data spasial dan non spasial.



Gambar Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (K5)**

Didalam Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan Metode Pelaksanaan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan di Tahun 2017 SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai 75.

Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama Setditjen

Penegakan Hukum diantaranya pembentukan UPT Penegakan Hukum, Penerapan Revolusi Mental dan Pencapaian SAKIP dan Laporan Keuangan yang WTP. Untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap seluruh kegiatan Penegakan Hukum, maka isu-isu yang perlu segera diperbaiki melingkupi

- 1) Perencanaan program, anggaran dan evaluasi yang akuntabel;
- 2) Penyampaian data dan informasi baik untuk publik, DPR maupun internal KLHK yang akurat dan tepat waktu;
- 3) Perbaikan kelembagaan baik di pusat maupun UPT yang efektif dan efisien;
- 4) Penyelesaian Aspek hukum pelaksanaan penegakan hukum yang terpadu;

- 5) Pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten;
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,
- 7) Pengelolaan aset dan keuangan termasuk didalamnya pencatatan, pembukuan, pelaporan, penggunaan serta kondisinya yang lengkap dan transparan.



*Gambar. IKK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2017*



### III. N.S.P.K

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing direktorat, yang mana setiap unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menyusun pedoman teknis (NSPK) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Sesuai dengan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1109 Permen LHK Nomor P.18/Menlhk-II/2015 serta mengadopsi perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menyusun petunjuk

operasional pelaksanaan penegakan hukum LHK.

Untuk itu, setiap unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan menyusun Pedoman Teknis (NSPK) yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang berisi antara lain prosedur dan mekanisme (*business process*), personel, dan tata hubungan kerja.

#### a. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Kewenangan untuk perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan dan pengamanan hutan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Standar Biaya Operasi Pengamanan hutan

- Tata cara perbantuan operasi gabungan untuk Pemerintah Daerah (KPHP/ KPHL)
- Tata cara pelaksanaan operasi bersama dikawasan Konservasi, Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- Tata cara pelimpahan hasil operasi (tersangka dan Barang Bukti) ke Dit. PHP
- Tata cara mobilisasi SPORC dan PPNS, PPLH
- Tata cara pembinaan Polhut dan SPORC
- Tata cara pemberian Insentif SPORC
- Tata cara operasional Brigade SPORC
- Tata cara Operasional Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum





b. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan pengaduan, pengawasan dan penerapan hukum sanksi administrasi lingkungan hidup dan kehutanan, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Tata cara penanganan Pengaduan (BLH dengan Ditjen PHLHK), mekanisme pos pengaduan balai PHLHK
- Mekanisme pemantauan pelimpahan pengaduan
- Tata cara pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung
- Tata cara Pengenaan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah
- Kriteria dan penetapan *second law enforcement*

c. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penerapan hukum

perdata lingkungan hidup, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Tata cara pelaksanaan mediasi dan penentuan kesepakatan
- Penetapan kriteria tenaga ahli
- Penyelesaian kasus non litigasi
- Tata cara pelaksanaan eksekusi kasus perdata

d. Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyidikan dan penerapan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan, berikut kebutuhan pedoman teknis (NSPK), yaitu:

- Tata cara operasi tangkap tangan
- Tata cara fasilitasi penanganan kasus Tindak Pidana LHK kepada penegak hukum lainnya
- Mekanisme penanganan kasus pidana bersama KSDAE
- Kriteria pemberian insentif PPNS LHK

- Tata cara penanganan kasus pidana LHK oleh Pemda
- Penetapan Kriteria tenaga/saksi ahli kasus pidana
- Penanganan barang bukti Tindak Pidana LHK

e. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK

Perumusan kebijakan penyelenggaraan dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

- Petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah
- Tata cara rekrutmen tenaga kontrak
- Tata cara penilaian Dupak fungsional PHLHK
- Tata cara pemberian bantuan hukum
- Tata cara kerja sama DN dan LN
- Tata cara pengelolaan dan hibah BMN
- Pembentukan tim cyber Pungli
- Tata cara pengelolaan OpsRoom



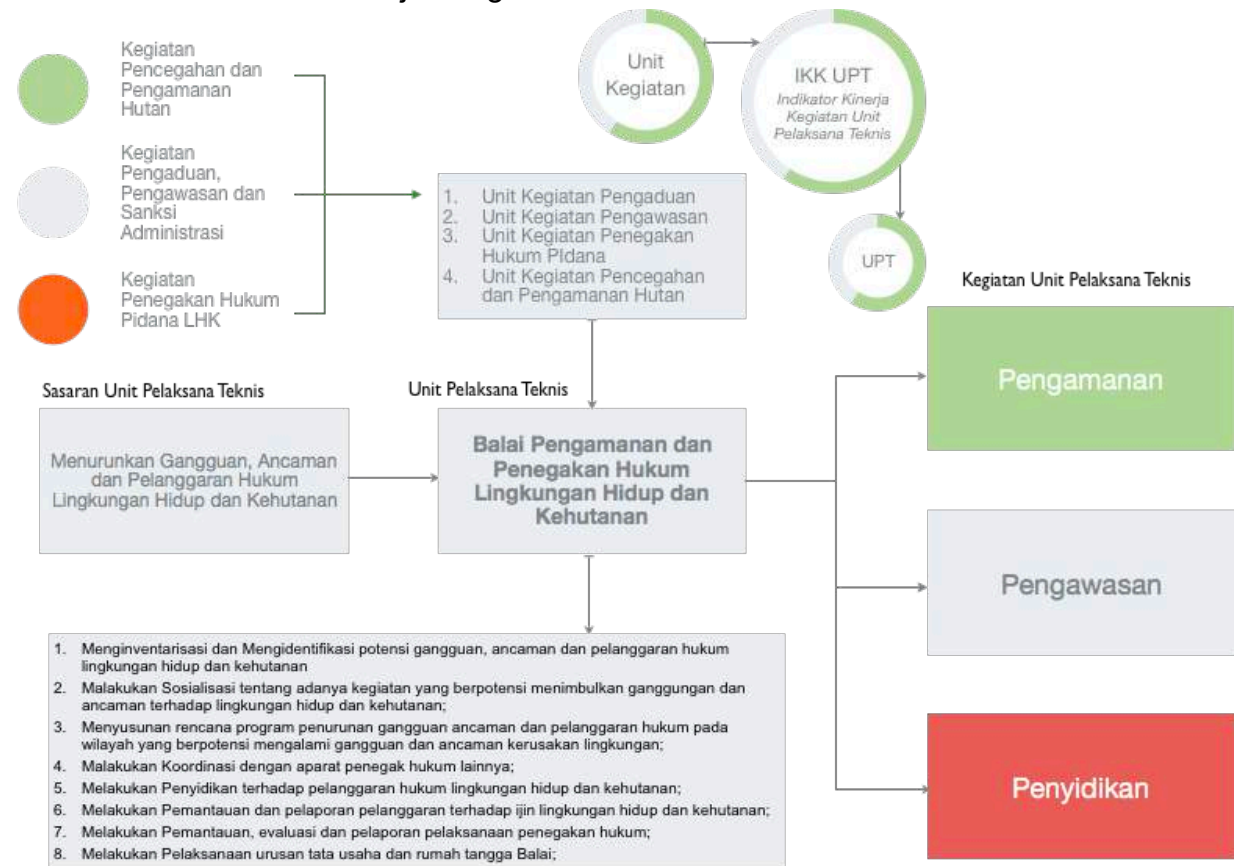
## BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

### II. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

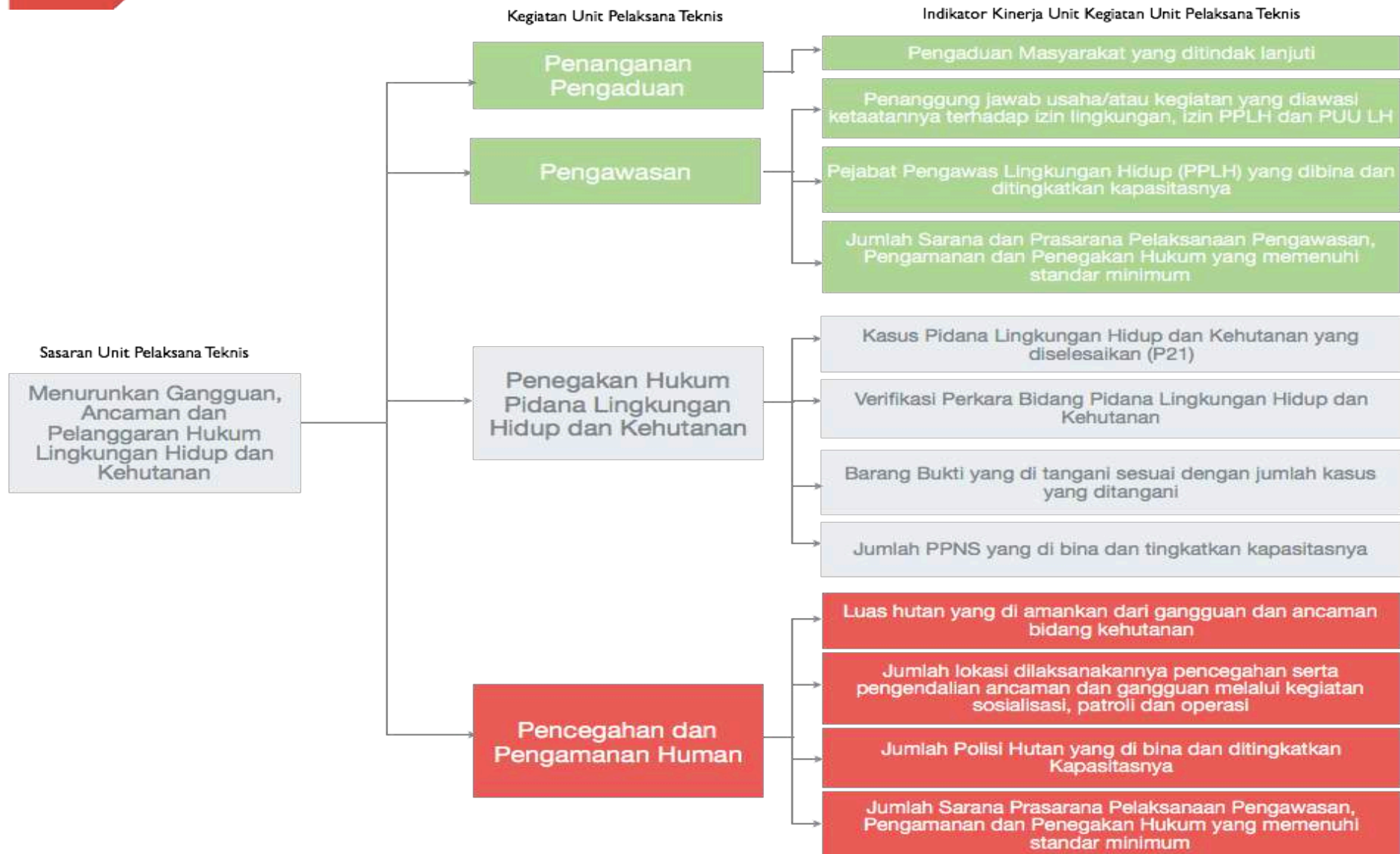
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15

tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPHLHK. Untuk Indikator Kinerja BPPHLHK, dengan Sinergitas Tugas dan Fungsi dan Unit Kegiatan terkait di dalam Indikator Kinerja Kegiatan

yang akan di lakukan BPPHLHK di 5 (Lima) Lokasi Kantor Balai dan 3 (Tiga) Kantor Seksi dibawah Masing-Masing BPPH LHK. Maka perlu *logic model* untuk IKK Unit Pelaksana Teknis.



Gambar : Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar. Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



## BAB IV KERANGKA PENDANAAN

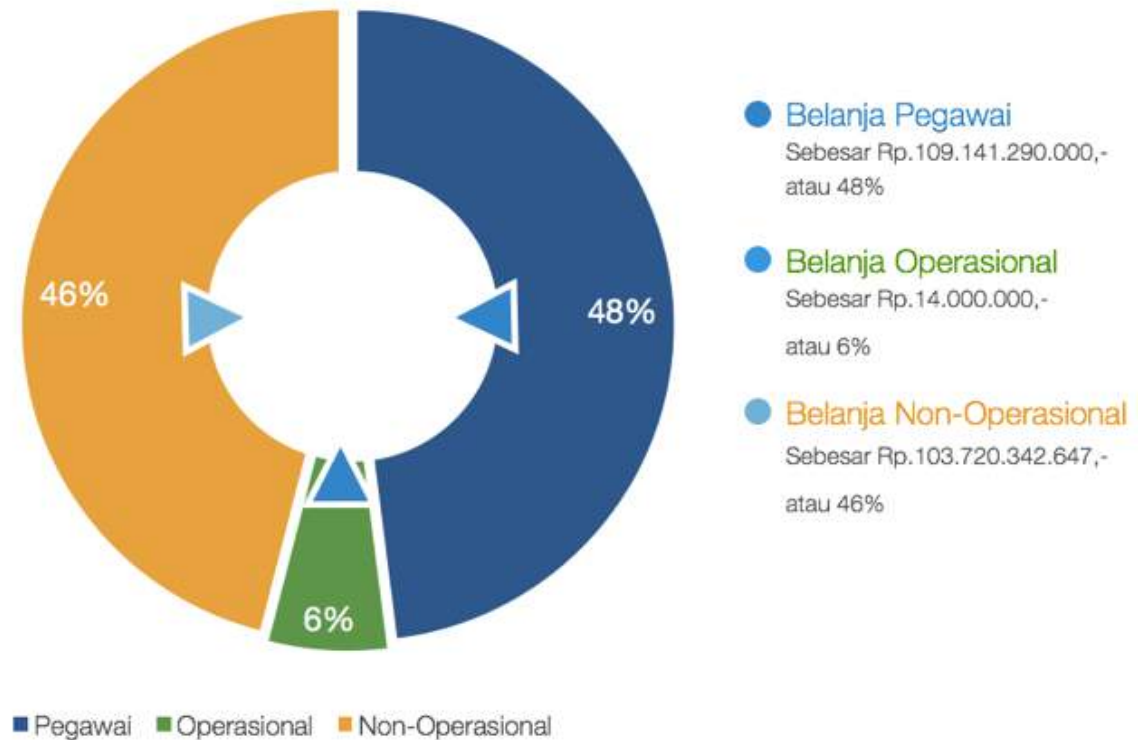
Skenario pendanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Program dan Sasaran Strategis tahun 2017 sebagaimana digambarkan Matrik di bawah ini. Skenario tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan organisasi, SDM, serta pengembangan wilayah, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Sumber pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama luar negeri dan kerja sama dalam negeri yang tidak merugikan

pemerintah.

Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana

Dekonsentrasi atau kepada Kepala Daerah kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus untuk mendukung tugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam Matrik sebagai berikut.



Gambar. Matrik Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Table 6 Matrik Pendanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

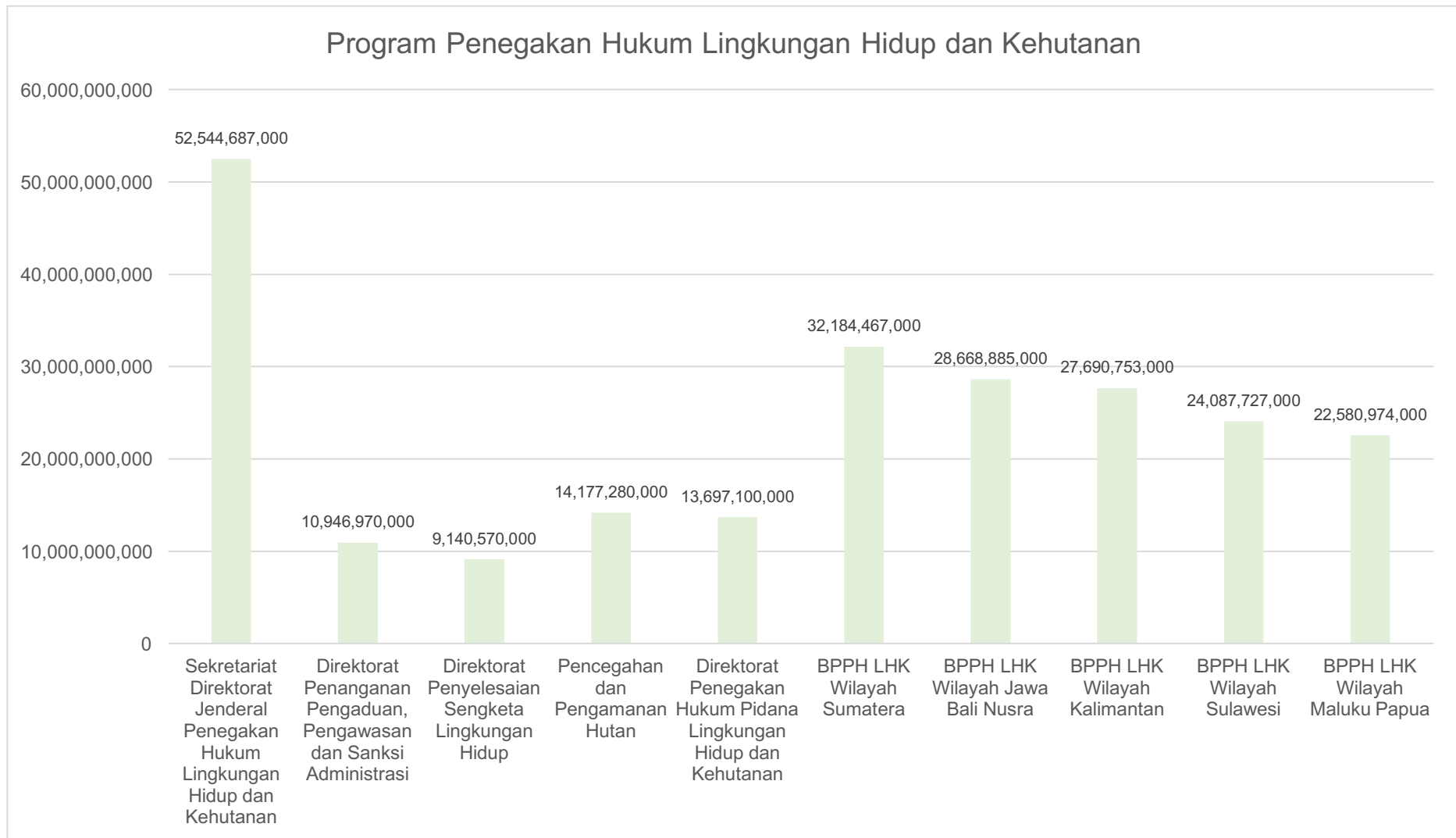
| Kode   | Satuan Kerja   | Belanja Pegawai | Belanja Barang Operasional | Belanja Barang Non Operasional |            |             | Jumlah<br>(dalam Ribuan) |
|--------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------|
|        |  |                 |                            | RM                             | PNBP       | Jumlah      |                          |
| 400424 | Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK      | 38,670,847      | 2,576,018                  | 8,897,822                      | 2,400,000  | 11,297,822  | 52,544,687               |
| 400425 | Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi |                 | 946,970                    | 7,000,000                      | 3,000,000  | 10,000,000  | 10,946,970               |
| 400426 | Penyelesaian Sengketa LH                                 |                 | 941,570                    | 5,739,300                      | 2,459,700  | 8,199,000   | 9,140,570                |
| 400427 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                          |                 | 1,177,280                  | 10,000,000                     | 3,000,000  | 13,000,000  | 14,177,280               |
| 400428 | Penegakan Hukum Pidana LHK                               |                 | 871,000                    | 9,826,100                      | 3,000,000  | 12,826,100  | 13,697,100               |
| 401814 | BPPH LHK Wilayah Sumatera                                | 17,383,467      | 1,755,060                  | 6,212,090                      | 6,833,850  | 13,045,940  | 32,184,467               |
| 401815 | BPPH LHK Wilayah Jawa Bali Nusra                         | 14,248,885      | 2,096,950                  | 5,796,050                      | 6,527,000  | 12,323,050  | 28,668,885               |
| 401816 | BPPH LHK Wilayah Kalimantan                              | 15,136,330      | 1,440,562                  | 6,152,261                      | 4,961,600  | 11,113,861  | 27,690,753               |
| 401817 | BPPH LHK Wilayah Sulawesi                                | 12,382,727      | 1,027,950                  | 6,330,300                      | 4,346,750  | 10,677,050  | 24,087,727               |
| 401818 | BPPH LHK Wilayah Maluku Papua                            | 11,319,034      | 1,166,640                  | 6,096,918                      | 3,998,382  | 10,095,300  | 22,580,974               |
| TOTAL  |  | 109,141,290     | 14,000,000                 | 72,050,841                     | 40,527,282 | 112,578,123 | 235,719,413              |

Table 7. Matriks Alokasi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

| NO    | SUMBER DANA | JENIS BELANJA |             |            | JUMLAH<br>(dalam Ribuan) |
|-------|-------------|---------------|-------------|------------|--------------------------|
|       |             | BEL. PEG      | BEL. BARANG | BEL. MODAL |                          |
| 1     | RM          | 109,141,290   | 77,184,194  | 8,866,647  | 195,192,131              |
| 2     | PNBP        | -             | 40,527,282  | -          | 40,527,282               |
| 3     | BLU         | -             | -           | -          | -                        |
| 4     | PLN         | -             | -           | -          | -                        |
| 5     | HLN         | -             | -           | -          | -                        |
| 6     | PDN         | -             | -           | -          | -                        |
| 7     | SBSN        | -             | -           | -          | -                        |
| TOTAL |             | 109,141,290   | 117,711,476 | 8,866,647  | 235,719,413              |



Table 8. Matrik Pembagian Pagu Anggaran lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017





## BAB V PENUTUP

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L dan lintas wilayah. Oleh karena itu Bappenas bertindak sebagai *system integrator* dan *resource allocator* antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi bisa tercapai.

Dalam pembahasan dengan K/L akan dilakukan pendekatan: *Money follow function* diubah menjadi *Money follow program*. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya. Pemantapan penyederhanaan nomenklatur, diperkuat dengan

pengujian pada setiap program/kegiatan:

- Apakah proyek ini perlu?
- Apakah proyek ini perlu sekarang?
- Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?
- Apakah proyek akan dapat lebih efisien?

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2107, beberapa hal yang telah dipersiapkan antara lain: Penetapan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017. Pemetaan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan agar kegiatan utama dapat terlaksana. Prioritas Nasional dan Kegiatan Utama telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 (bersifat given).

Pemetaan K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas. Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan *money follow program*, Bappenas telah menyiapkan: Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target K/L / Pemda yang melaksanakan kegiatan pendukung. Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut. Indikasi Program, Alokasi Anggaran, lokasi, dll didiskusikan dengan K/L dan Pemda terkait melalui forum Multilateral Meeting.

Semua program/kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melewati ujian: Manfaat, Prioritas, Efektifitas dan Efisiensi.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN





Table 9 Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017

| Program/Kegiatan                                       | Sasaran   | Indikator  | Target        | Pagu ('000) | Penanggung Jawab                      |
|--|---|--|---------------|-------------|---------------------------------------|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)           | (5)         | (6)                                   |
| Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan |   |  |               | 235,719,413 | Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK |
|  | Seluruh pemegang izin lingkungan menaati peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan           |  |               |             |                                       |
|  |   | Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan     | 60%           |             |                                       |
|  | Meningkatnya Hak-Hak Negara atas pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup                              |  |               |             |                                       |
|  |   | Jumlah penyelesaian kasus sampai P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar | 40 Kasus      |             |                                       |
|  | Meningkatnya kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan dan keamanan hutan |  |               |             |                                       |
|  |   | Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan dan keamanan hutan          | 4 Juta Hektar |             |                                       |



Table 10 .Arsitektur Data Informasi dan Kinerja, Anggaran dan Target Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

| KODE        | URAIAN   | ANGGARAN<br>(000) | VOLUME    | SATUAN        |
|-------------|--|-------------------|-----------|---------------|
| 029         | <b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>  |                   |           |               |
| 029.10      | <b>DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>  |                   |           |               |
| 029.10.12   | <b>PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>  | 235,719,413       |           |               |
| <b>5427</b> | <b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>              | 134,141,290       |           |               |
| 5427.001    | Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 9,850,000         | 75        | Poin          |
| 5427.951    | Layanan Internal (Overhead)  | 1,150,000         | 1         | Layanan       |
| 5427.994    | Layanan Perkantoran  | 123,141,290       | 12        | Bulan         |
| <b>5428</b> | <b>PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN</b>   | 41,632,385        |           |               |
| 5428.001    | Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan   | 4,390,958         | 4.000.000 | Hektar        |
| 5428.002    | Jumlah Lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi       | 14,123,357        | 34        | Provinsi      |
| 5428.003    | Jumlah Polisi Hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya  | 3,394,702         | 1500      | Orang         |
| 5428.004    | Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum                             | 7,911,560         | 16        | Brigade SPORC |
| 5428.951    | Layanan Internal (Overhead)  | 11,811,808        |           |               |
| <b>5429</b> | <b>PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP</b>  | 8,199,000         |           |               |
| 5429.001    | Pendaftaran dan Penyelesaian Gugatan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 4,815,936         | 10        | Gugatan       |
| 5429.002    | Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan yang telah diverifikasi                                       | 3,001,922         | 75        | Persentase    |



|  |             |  |            |     |                               |
|--|-------------|--|------------|-----|-------------------------------|
|  | 5429.951    | Layanan Internal (Overhead)  | 381,142    | 1   | Layanan                       |
|  | <b>5430</b> | <b>PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI</b>  | 19,870,578 |     |                               |
|  | 5430.001    | Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti  | 7,693,002  | 100 | Persentase dari 500 Pengaduan |
|  | 5430.002    | Penanggungjawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH  | 6,806,340  | 60  | Persentase dari 500 Izin      |
|  | 5430.003    | Sanksi Administrasi yang ditaat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun          | 2,885,270  | 70  | Persentase dari 100 Sanksi    |
|  | 5430.004    | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya                           | 915,532    | 50  | PPLH                          |
|  | 5430.005    | Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum | 1,304,764  | 20  | PPLH                          |
|  | 5430.951    | Layanan Internal (Overhead)  | 265,650    | 1   | Layanan                       |
|  | <b>5431</b> | <b>PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>   | 31,876,160 |     |                               |
|  | 5431.001    | Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan (P21)  | 16,321,110 | 50  | Persentase dari 150 kasus     |
|  | 5431.002    | Verifikasi perkara bidang pidana lingkungan hidup dan kehutanan  | 5,643,310  | 150 | Perkara                       |
|  | 5431.003    | Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani  | 4,994,610  | 100 | Persentase dari 75 kasus      |
|  | 5431.004    | Fasilitasi penanganan kasus  | 192,000    | 15  | Kasus                         |
|  | 5431.005    | Pelaksanaan eksaminasi kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan                                    | 534,900    | 20  | Persentase dari 15 Eksaminasi |
|  | 5431.006    | Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang                                     | 3,986,778  | 300 |                               |
|  | 5431.951    | Layanan Internal (Overhead)  | 203,452    | 1   | Layanan                       |



Table 11. Matrik Distribusi Target Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;

| NO       | KODE        | PUSAT  | UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) |                 |                 |               |                   | TARGET          |        |                                 |
|----------|-------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
|          |             |  | BPPH SUMATERA               | BPPH JABALNUSRA | BPPH KALIMANTAN | BPPH SULAWESI | BPPH MALUKU PAPUA | TOTAL           | VOL    | SATUAN                          |
| <b>1</b> | <b>5427</b> | <b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA</b>     |                             |                 |                 |               |                   |                 |        |                                 |
|          | 5427.001    | 75   |                             |                 |                 |               |                   | 75              | 75     | Poin                            |
| <b>2</b> | <b>5428</b> | <b>PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN</b>                       |                             |                 |                 |               |                   |                 |        |                                 |
|          | 5428.001    | 500,000  | 800,000                     | 600,000         | 720,000         | 650,000       | 730,000           | 4.000.000       | 4 Juta | Hektar                          |
|          | 5428.002    | 5  | 8                           | 7               | 5               | 5             | 4                 | 34              | 34     | Provinsi                        |
|          | 5428.003    | 143  | 275                         | 270             | 270             | 270           | 272               | 1,500           | 1,500  | Orang                           |
|          | 5428.004    |  | 4                           | 3               | 3               | 3             | 3                 | 16              | 16     | Brigade SPORC                   |
| <b>4</b> | <b>5430</b> | <b>PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI</b>         |                             |                 |                 |               |                   |                 |        |                                 |
|          | 5430.001    | 25   | 22                          | 19              | 15              | 11            | 8                 | 100             | 100    | Persentase dari 500 Pengaduan   |
|          | 5430.002    | 20   | 8                           | 20              | 4               | 6             | 2                 | 60              | 60     | Persentase dari 500 izin        |
|          | 5430.003    | 70   | <b>1</b>                    |                 |                 |               |                   | 70              | 70     | Persentase dari 100 Perusahaan  |
|          | 5430.004    | 43   | 0                           | 0               | 0               | 5             | 2                 | 50              | 50     | PPLH                            |
|          | 5430.005    | 14   | 0                           | 3               | 0               | 2             | 1                 | 20              | 20     | PPLH                            |
| <b>5</b> | <b>5431</b> | <b>PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b> |                             |                 |                 |               |                   |                 |        |                                 |
|          | 5431.001    | 10%  | 11%                         | 10%             | 8%              | 6%            | 5%                | 75 Kasus        | 50     | Persentase dari 150 Kasus       |
|          | 5431.002    | 25   | 38                          | 33              | 25              | 16            | 13                | 150 Perkara     | 150    | Kasus/Perkara                   |
|          | 5431.003    | 20%  | 22%                         | 20%             | 16%             | 12%           | 10 %              | 75 Barang Bukti | 100    | Persentase dari 75 Barang Bukti |
|          | 5431.004    | 15   |                             |                 |                 |               |                   | 15              | 15     | Kasus                           |
|          | 5431.005    | 20%  |                             |                 |                 |               |                   | 3 Eksaminasi    | 20     | Persentase dari 15 Eksaminasi   |
|          | 5431.006    | 260  | 0                           | 0               | 0               | 20            | 20                | 300             | 300    | Orang                           |



Table 12 Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2017

| Program/Kegiatan  | Sasaran   | Indikator   | Target                 | Pagu ('000) | Penanggung Jawab                                       |
|---|---|---|------------------------|-------------|--|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)                    | (5)         | (6)  |
| Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi |   |   |                        | 10,946,970  | Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi |
|   | Meningkatnya Efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU, dan Ketaatan terhadap Sanksi Administrasi |   |                        |             |  |
|   |   | Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti   | 25% dari 500 Pengaduan |             |  |
|   |   | Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH | 20% dari 500 izin      |             |  |
|   |   | Sanksi Administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun                       | 70% dari 100 Sanksi    |             |  |
|   |   | Pejabat Pengawas Lingkungan(PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya   | 43 PPLH                |             |  |
|   |   | Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar Layanan Internal   | 14 PPLH<br>1 Layanan   |             |  |



Table 13 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup TA 2017

| Program/Kegiatan                                | Sasaran   | Indikator   | Target     | Pagu ('000) | Penanggung Jawab                                |
|---|---|---|------------|-------------|---|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)        | (5)         | (6)   |
| Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup |   |   |            | 9,140,570   | Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup |
|   | Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup |   |            |             |   |
|   |   | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di Luar Pengadilan yang telah di Verifikasi | 75%        |             |   |
|   |   | Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal 10 gugatan pertahun              | 10 Gugatan |             |   |
|   |   | Layanan Internal  | 1 Layanan  |             |   |



Table 14 Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017

| Program/Kegiatan   | Sasaran   | Indikator   | Target                   | Pagu ('000) | Penanggung Jawab                    |
|--|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)                      | (5)         | (6)                                 |
| Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan |   |   |                          | 13,697,100  | Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK |
|  | Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan |   |                          |             |                                     |
|  |   | Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan (P21)       | 10% dari 150 kasus       |             |                                     |
|  |   | Verifikasi perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan                  | 25 Kasus/ Perkara        |             |                                     |
|  |   | Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani     | 20% dari 75 Barang Bukti |             |                                     |
|  |   | Fasilitasi penanganan kasus   | 15 Kasus                 |             |                                     |
|  |   | Pelaksanaan eksaminasi kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan | 20% dari 15 Eksaminasi   |             |                                     |
|  |   | jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang  | 260 Orang                |             |                                     |
|  |   | Layanan internal (Overhead)   | 1 Layanan                |             |                                     |



Table 15 Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan TA 2017

| Program/Kegiatan                         | Sasaran   | Indikator  | Target         | Pagu ('000) | Penanggung Jawab                         |
|--|---|--|----------------|-------------|--|
| (1)                                      | (2)   | (3)  | (4)            | (5)         | (6)                                      |
| Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan |   |  |                | 14,177,280  | Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan |
|  | Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi |  |                |             |  |
|  |   | Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan   | 500.000 Hektar |             |  |
|  |   | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi | 5 Provinsi     |             |  |
|  |   | Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya  | 143 Orang      |             |  |
|  |   | Layanan internal   | 1 Layanan      |             |  |





Table 16 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya TA 2017

| Program/Kegiatan                                       | Sasaran   | Indikator   | Target                           | Pagu ('000) | Penanggung Jawab  |
|--|---|---|----------------------------------|-------------|---|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)                              | (5)         | (6)   |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Unit Teknis Lainnya |   |   |                                  | 52,544,687  | Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|  | Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan |   |                                  |             |   |
|  |   | SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78.00(A) di tahun 2019<br>Layanan Internal<br>Layanan Perkantoran | 75 Poin<br>1 Layanan<br>12 Bulan |             |   |



Table 17 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera tahun 2017

| No  | Satuan Kerja             | Kegiatan  | Output   | Komponen  | Target          | Anggaran |                |
|-----|--------------------------|---|--|---|-----------------|----------|----------------|
| (1) | (2)                      | (3)   | (4)  | (5)   | (6)             | (7)      |                |
| 1   | <b>BPPH LHK SUMATERA</b> |   |  |   |                 |          | 32,184,467,000 |
|     |                          | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK |  |   |                 |          |                |
|     |                          |   | Layanan Perkantoran  |   | 12 Bln          |          |                |
|     |                          |   |  | Gaji dan Tunjangan  |                 |          |                |
|     |                          |   |  | Operasional dan Pemeliharaan Kantor   |                 |          |                |
|     |                          | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                               |  |   |                 |          |                |
|     |                          |   | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman  |   | 800.000 Hektar  |          |                |
|     |                          |   |  | Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan |                 |          |                |
|     |                          |   | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi |   | 8 Provinsi      |          |                |
|     |                          |   |  | Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan                       |                 |          |                |
|     |                          |   |  | Sosialisasi pencegahan dan pengamanan hutan                                   |                 |          |                |
|     |                          |   | Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya  |   | 275 org         |          |                |
|     |                          |   |  | Peningkatan kapasitas polisi kehutanan  |                 |          |                |
|     |                          |   | Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum                       |   | 4 Brigade SPORC |          |                |
|     |                          |   |  | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan                |                 |          |                |
|     |                          |   |  | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan             |                 |          |                |
|     |                          |   | Layanan Internal   |   | 1 Layanan       |          |                |



|  |  |  |  |   |                          |  |
|--|--|--|--|---|--------------------------|--|
|  |  |  |  | Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit            |                          |  |
|  |  |  |  | Peralatan dan mesin                                       |                          |  |
|  |  |  |  | Gedung dan bangunan                                       |                          |  |
|  |  |  |  | data dan informasi  |                          |  |
| Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi |  |  |  |   |                          |  |
|  |  |  | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  |   | 22% dari 500 pengaduan   |  |
|  |  |  |  | Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan |                          |  |
|  |  |  | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH |   | 8% dari 500 izin         |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar               |                          |  |
|  |  |  | Layanan internal   |   | 1 Layanan                |  |
|  |  |  |  | Peralatan dan mesin                                       |                          |  |
| Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan    |  |  |  |   |                          |  |
|  |  |  | Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)   |   | 11 % dari 150 kasus      |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penyidikan                                    |                          |  |
|  |  |  |  | Gelar perkara   |                          |  |
|  |  |  | Verifikasi perkara bidang pidana LHK   |   | 38 Kasus/Perkara         |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan              |                          |  |
|  |  |  | Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani  |   | 22% dari 75 barang bukti |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penanganan barang bukti                       |                          |  |



Table 18 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun 2017

| No       | Satuan Kerja                              | Kegiatan  | Output   | Komponen   | Target          | Anggaran       |
|----------|---|---|--|--|-----------------|----------------|
| (1)      | (2)                                       | (3)   | (4)  | (5)  | (6)             | (7)            |
| <b>2</b> | <b>BPPH LHK JAWA, BALI, NUSA TENGGARA</b> |   |  |  |                 | 28,668,885,000 |
|          |   | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK |  |  |                 |                |
|          |   |   | Layanan Perkantoran  |  | 12 Bln          |                |
|          |   |   |  | Gaji dan Tunjangan   |                 |                |
|          |   |   |  | Operasional dan Pemeliharaan Kantor  |                 |                |
|          |   | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                               |  |  |                 |                |
|          |   |   | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman  |  | 600.000 Hektar  |                |
|          |   |   |  | Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan        |                 |                |
|          |   |   |  | Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan |                 |                |
|          |   |   | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi |  | 7 provinsi      |                |
|          |   |   |  | Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan                              |                 |                |
|          |   |   | Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya  |  | 270 Orang       |                |
|          |   |   |  | Peningkatan kapasitas polisi kehutanan   |                 |                |
|          |   |   | Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum                       |  | 3 Brigade SPORC |                |
|          |   |   |  | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan                       |                 |                |
|          |   |   |  | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan                    |                 |                |
|          |   |   | Layanan Internal   |  | 1 Layanan       |                |
|          |   |   |  | Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit                                       |                 |                |



|  |  |  |  |   |                          |  |  |
|--|--|--|--|---|--------------------------|--|--|
|  |  |  |  | Peralatan dan mesin   |                          |  |  |
|  |  |  |  | Gedung dan bangunan   |                          |  |  |
|  |  |  |  | Data dan informasi  |                          |  |  |
|  |  | Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi |  |   |                          |  |  |
|  |  |  | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  |   | 19% dari 500 Pengaduan   |  |  |
|  |  |  |  | Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan                                       |                          |  |  |
|  |  |  |  | Pembentukan Pos Pengaduan   |                          |  |  |
|  |  |  | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH |   | 20% dari 500 Izin        |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar   |                          |  |  |
|  |  |  | Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar         |   | 3 PPLH                   |  |  |
|  |  |  |  | Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar |                          |  |  |
|  |  | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan    |  |   |                          |  |  |
|  |  |  | Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)   |   | 10% dari 150 Kasus       |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penyidikan  |                          |  |  |
|  |  |  |  | Gelar perkara   |                          |  |  |
|  |  |  | Verifikasi perkara bidang pidana LHK   |   | 33 Kasus/Perkara         |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan  |                          |  |  |
|  |  |  | Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani  |   | 20% dari 75 Barang Bukti |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penanganan barang bukti   |                          |  |  |



Table 19 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan tahun 2017

| No       | Satuan Kerja               | Kegiatan  | Output   | Komponen   | Target          | Anggaran |                |
|----------|----------------------------|---|--|--|-----------------|----------|----------------|
| (1)      | (2)                        | (3)   | (4)  | (5)  | (6)             | (7)      |                |
| <b>3</b> | <b>BPPH LHK KALIMANTAN</b> |   |  |  |                 |          | 27,690,753,000 |
|          |                            | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK |  |  |                 |          |                |
|          |                            |   | Layanan Perkantoran  |  | 12 bln          |          |                |
|          |                            |   |  | Gaji dan Tunjangan   |                 |          |                |
|          |                            |   |  | Operasional dan Pemeliharaan Kantor  |                 |          |                |
|          |                            | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                               |  |  |                 |          |                |
|          |                            |   | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman  |  | 720,000 Hektar  |          |                |
|          |                            |   |  | Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan        |                 |          |                |
|          |                            |   |  | Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan |                 |          |                |
|          |                            |   | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi |  | 5 Provinsi      |          |                |
|          |                            |   |  | Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan                              |                 |          |                |
|          |                            |   | Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya  |  | 270 Orang       |          |                |
|          |                            |   |  | Peningkatan kapasitas polisi kehutanan   |                 |          |                |
|          |                            |   | Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum                       |  | 3 Brigade SPORC |          |                |
|          |                            |   |  | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan                    |                 |          |                |
|          |                            |   | Layanan Internal   |  | 1 Layanan       |          |                |



|  |  |  |  |   |                        |  |
|--|--|--|--|---|------------------------|--|
|  |  |  |  | Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit            |                        |  |
|  |  |  |  | Peralatan dan mesin                                       |                        |  |
|  |  |  |  | Gedung dan bangunan                                       |                        |  |
|  |  |  |  | Data dan informasi  |                        |  |
| Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi |  |  |  |   |                        |  |
|  |  |  | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  |   | 15% dari 500 Pengaduan |  |
|  |  |  |  | Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan |                        |  |
|  |  |  | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH |   | 4% dari 500 izin       |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar               |                        |  |
| Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan    |  |  |  |   |                        |  |
|  |  |  | Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)   |   | 8% dari 150 kasus      |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penyidikan                                    |                        |  |
|  |  |  |  | Gelar perkara   |                        |  |
|  |  |  | Verifikasi perkara bidang pidana LHK   |   | 25 Kasus/Perkara       |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan              |                        |  |
|  |  |  | Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani  |   | 16% dari 75 Kasus      |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penanganan barang bukti                       |                        |  |



Table 20 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi tahun 2017

| No       | Satuan Kerja             | Kegiatan  | Output   | Komponen   | Target          | Anggaran |                |
|----------|--------------------------|---|--|--|-----------------|----------|----------------|
| (1)      | (2)                      | (3)   | (4)  | (5)  | (6)             | (7)      |                |
| <b>4</b> | <b>BPPH LHK SULAWESI</b> |   |  |  |                 |          | 24,087,727,000 |
|          |                          | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK |  |  |                 |          |                |
|          |                          |   | Layanan Perkantoran  |  | 12 Bln          |          |                |
|          |                          |   |  | Gaji dan Tunjangan   |                 |          |                |
|          |                          |   |  | Operasional dan Pemeliharaan Kantor  |                 |          |                |
|          |                          | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                               |  |  |                 |          |                |
|          |                          |   | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman  |  | 650.000 Hektar  |          |                |
|          |                          |   |  | Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan        |                 |          |                |
|          |                          |   |  | Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan |                 |          |                |
|          |                          |   | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi |  | 5 Provinsi      |          |                |
|          |                          |   |  | PPH dan peredaran hasil hutan  |                 |          |                |
|          |                          |   |  | Sosialisasi peraturan tentang Penegakan Hukum LHK                                    |                 |          |                |
|          |                          |   | Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya  |  | 270 Orang       |          |                |
|          |                          |   |  | Peningkatan kapasitas polisi kehutanan   |                 |          |                |
|          |                          |   | Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum                       |  | 3 Brigade SPORC |          |                |
|          |                          |   |  | Pengadaan sarana dan prasarana PPH   |                 |          |                |
|          |                          |   |  | Pemeliharaan sarana dan prasarana PPH  |                 |          |                |
|          |                          |   | Layanan Internal   |  | 1 Layanan       |          |                |
|          |                          |   |  | Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit                                       |                 |          |                |
|          |                          |   |  | Peralatan dan mesin  |                 |          |                |
|          |                          |   |  | Gedung dan bangunan  |                 |          |                |
|          |                          |   |  | Data dan informasi   |                 |          |                |
|          |                          | Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi      |  |  |                 |          |                |





|  |  |   |  |   |                        |  |  |
|--|--|---|--|---|------------------------|--|--|
|  |  |   | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  |   | 11% dari 500 Pengaduan |  |  |
|  |  |   |  | Verifikasi pengaduan kasus LHK  |                        |  |  |
|  |  |   |  | Pembentukan Pos Pengaduan   |                        |  |  |
|  |  |   | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH |   | 6% dari 500 izin       |  |  |
|  |  |   |  | Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar   |                        |  |  |
|  |  |   |  | Pengawasan Langsung   |                        |  |  |
|  |  |   | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya                               |   | 5 PPLH                 |  |  |
|  |  |   |  | Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup   |                        |  |  |
|  |  |   | Jumlah sarana dan prasarana pengawasan, pengamanan dan penegakan hkuum yang memenuhi standar minimum             |   | 2 PPLH                 |  |  |
|  |  |   |  | Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar |                        |  |  |
|  |  | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan |  |   |                        |  |  |
|  |  |   | Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)   |   | 6% dari 150 kasus      |  |  |
|  |  |   |  | Pelaksanaan penyidikan  |                        |  |  |
|  |  |   |  | Gelar perkara   |                        |  |  |
|  |  |   | Verifikasi perkara bidang pidana LHK   |   | 16 Perkara             |  |  |
|  |  |   |  | Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan  |                        |  |  |
|  |  |   | Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani  |   | 12% dari 75 Kasus      |  |  |
|  |  |   |  | Pelaksanaan penanganan barang bukti   |                        |  |  |
|  |  |   | Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang   |   | 20 Orang               |  |  |
|  |  |   |  | Peningkatan kompetensi PPNS dalam penerapan 6 Undang Undang LHK                                 |                        |  |  |
|  |  |   | Layanan Internal   |   | 1 Layanan              |  |  |
|  |  |   |  | Peralatan dan mesin   |                        |  |  |



Table 21 Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua tahun 2017

| No  | Satuan Kerja                 | Kegiatan  | Output   | Komponen   | Target          | Anggaran |                |
|-----|------------------------------|---|--|--|-----------------|----------|----------------|
| (1) | (2)                          | (3)   | (4)  | (5)  | (6)             | (7)      |                |
| 5   | <b>BPPH LHK MALUKU PAPUA</b> |   |  |  |                 |          | 22,580,974,000 |
|     |                              | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PHLHK |  |  |                 |          |                |
|     |                              |   | Layanan Perkantoran  |  | 12 Bln          |          |                |
|     |                              |   |  | Gaji dan Tunjangan   |                 |          |                |
|     |                              |   |  | Operasional dan Pemeliharaan Kantor  |                 |          |                |
|     |                              | Pencegahan dan Pengamanan Hutan                               |  |  |                 |          |                |
|     |                              |   | Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman  |  | 730.000 hektar  |          |                |
|     |                              |   |  | Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan        |                 |          |                |
|     |                              |   |  | Monitoring dan Evaluasi Ancaman dan Gangguan Kawasan hutan dan peredaran hasil hutan |                 |          |                |
|     |                              |   | Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi |  | 4 Provinsi      |          |                |
|     |                              |   |  | Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan                              |                 |          |                |
|     |                              |   |  | Sosialisasi peraturan tentang Penegakan Hukum LHK                                    |                 |          |                |
|     |                              |   | Jumlah polisi hutan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya  |  | 272 Orang       |          |                |
|     |                              |   |  | Peningkatan kapasitas polisi kehutanan   |                 |          |                |
|     |                              |   | Jumlah sarana prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum                       |  | 3 Brigade SPORC |          |                |
|     |                              |   |  | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan                       |                 |          |                |
|     |                              |   |  | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan                    |                 |          |                |
|     |                              |   | Layanan Internal   |  | 1 Layanan       |          |                |
|     |                              |   |  | Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit                                       |                 |          |                |
|     |                              |   |  | Peralatan dan mesin  |                 |          |                |
|     |                              |   |  | Gedung dan bangunan  |                 |          |                |
|     |                              |   |  | Data dan informasi   |                 |          |                |



|  |  |  |  |   |                       |
|--|--|--|--|---|-----------------------|
|  |  | Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi |  |   |                       |
|  |  |  | Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  |   | 8% dari 500 Pengaduan |
|  |  |  |  | Verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan   |                       |
|  |  |  |  | Pembentukan Pos Pengaduan   |                       |
|  |  |  | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH |   | 2% dari 500 izin      |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengawasan langsung skala besar   |                       |
|  |  |  |  | Pengawasan Langsung   |                       |
|  |  |  | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya                               |   |                       |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)  | 2 PPLH                |
|  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum             |   |                       |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum | 1 PPLH                |
|  |  | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan    |  |   |                       |
|  |  |  | Kasus pidana LHK yang diselesaikan (P21)   |   | 5% dari 150 kasus     |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penyidikan  |                       |
|  |  |  |  | Gelar perkara   |                       |
|  |  |  | Verifikasi perkara bidang pidana LHK   |   | 13 Perkara            |
|  |  |  |  | Pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan  |                       |
|  |  |  | Barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani  |   | 10% dari 75 Kasus     |
|  |  |  |  | Pelaksanaan penanganan barang bukti   |                       |
|  |  |  | Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang   |   | 20 Orang              |
|  |  |  |  | Peningkatan kompetensi PPNS dalam penerapan 6 Undang Undang LHK   |                       |
|  |  |  | Layanan Internal   |   | 12 Bln                |
|  |  |  |  | Peralatan dan mesin   |                       |



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

2017

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI  
BLOK IV LT 4, JL. GATOT SUBROTO,  
JAKARTA

